

Berita	: Potensi Pajak Reklame Anjlok
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.2
Edisi	: Jum'at, 12 Januari 2018

# Potensi Pajak Reklame Anjlok

## Pemkot Bandung Dinilai Lamban Rumuskan Aturan Teknis

### BANDUNG, (PR).-

Survei tujuh mata pajak oleh Pemerintah Kota Bandung menemukan potensi penambahan peridapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga Rp 97 miliar per tahun. Sebaliknya, potensi pajak reklame yang sebelumnya disebut-sebut mencapai lebih dari Rp 100 miliar, disebut hanya Rp 34 miliar per tahun.

Ketetapan PBB tahun 2017 sebesar Rp 557 miliar. Lewat sensus PBB, ditargetkan pendapatan di tahun 2018 mencapai Rp 655 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna menjelaskan, penambahan ketetapan PBB terutama diperoleh dari dua kategori pemutakhiran

data, yakni penambahan bangunan dan penamabahan jumlah lantai bangunan. BPPD saat ini tengah merampungkan pencetakan surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2018.

"Kami sudah tetapkan target pendapatan PBB tahun ini Rp 655 miliar. Kami yakin dengan target ini karena didasarkan pada hasil sensus yang valid dan mendetail. Kami bisa mempertanggungjawabkannya," tutur Ema, Kamis (11/1/2018) siang, di Balai Kota Bandung.

Jika survei PBB menghasilkan penambahan potensi dalam jumlah signifikan, hal sebaliknya terjadi pada survei pajak reklame. Potensi pajak reklame disebut tak lebih dari Rp 34 miliar per tahun. "Pada awalnya saya juga kaget disodori angka itu oleh perusahaan pemenang tender survei ini. Selama ini kan disebut-sebut potensi pajak kita sangat besar, di atas Rp 100 miliar," ucap Ema.

Meski menyebut potensi maksimal

pajak reklame Rp 34 miliar, Pemkot dan DPRD Kota Bandung sepakat untuk tidak menurunkan target pendapatan tahun 2018, yakni sebesar Rp 244 miliar. Pada 2017 lalu, pendapatan pajak reklame anjlok menjadi hanya Rp 12,8 miliar.

"Karena sudah menjadi kesepakatan, yang bisa kami kerjakan ya berusaha sekuat mungkin mencapainya. Selain pembayaran tunggakan-tunggakan pajak, kami juga berharap pada makin efektifnya aturan baru penyelenggaraan reklame di lapangan," katanya.

Pemkot Bandung mengumpulkan pendapatan pajak Rp 2,1 triliun pada 2017, atau naik lebih dari Rp 460 miliar dari tahun sebelumnya. Pada 2018 ini, Pemkot menargetkan total pendapatan pajak hingga Rp 2,6 triliun.

Ema menyatakan, ada dua kunci utama mencapai target tersebut, yakni peningkatan efektivitas sosialisasi pajak dan penegakan aturan. Keduanya terbukti ampuh mendorong

pendapatan pajak sepanjang 2017 lalu.

### Lamban

Penyelenggaraan reklame di Kota Bandung menjadi sorotan sejak lama. Potensi yang disebut-sebut begitu besar tidak terkelola secara maksimal akibat simpang-siurnya aturan.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama berpendapat, pemkot terlalu lamban merumuskan Peraturan Wali Kota sebagai turunan peraturan daerah baru yang disahkan akhir 2016 lalu. Ia juga melihat adanya keragu-raguan dari para pejabat untuk mengeksekusi kebijakan akibat belum terbentuknya payung aturan teknis tersebut.

"Perda baru punya dua tujuan pokok, yakni membuat penyelenggaraan reklame sebagai bagian dari estetika kota serta mendorong jumlah pendapatan pajak. Sepanjang 2017, keduanya tidak tercapai," ucapnya. (Tri Joko Her Riadi)\*\*\*